

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Saebani, B. (2014). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia. Bandung.
- Amirudin & Zainal, A. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Athoilah, *Fiqh Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. (2013). Yrama Widya, Bandung.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia. Jakarta.
- Habiburrahman. (2011). *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- M. Anshary. (2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Rajagrafindo Persada
- Prodjodikoro, W. (2006). *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.
- Putra Jaya, D. (2020). Editor: IIm Fahimah, HUKUM KEWARISAN DI

INDONESIA.

Pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rafim Faqih. (2017). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, Cetakan I, GAMA MEDIA, Yogyakarta.

Wardah Nuroniyah. (2016). *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, Cinta Buku Media, Tangerang Selatan.

## **2. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Anak Luar Kawin.

### 4. Jurnal

Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2). DOI : <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5242>

Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56. DOI : <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160>

Erbakan, I. R. (2021). Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Dinamika*, 27(8), 1102-1115.

Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Diversi*, 4(2), 276322. DOI : <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>

Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.

Sukranatha, A. A. K., & Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1-10. DOI : <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160>

## 5. Internet

Si Pokrol, *Affirmative Action*, Hukum Online, 2009,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/>,

Diakses Pada 19 Maret 2024 Pukul 12.40 WIB.